

ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA (Perspektif Sejarah)

ISLAM AND POLITICS IN INDONESIA (Historical Perspective)

Qisthi Faradina Ilma Mahanani¹, Mega Alif Marintan²,
Irma Ayu Kartika Dewi³, Moh. Ashif Fuadi⁴

¹²³ UIN Raden Mas Said Surakarta

 gisthi.fim@staff.uinsaid.ac.id

Article history:

Submitted: 18 Juni 2022

Accepted: 20 Juni 2022

Published: 28 Juli 2022

Abstract: *This research explains the dynamic perspective of Islam and politics in Indonesia. The relationship between Islam and the political situation in Indonesia is not always harmonious. With qualitative methods through the study of literature, this research resulted in the conclusion that Islamic and political indication are two aspects that converge in its development that has never been interrupted from the previous period. The existence of Islam in Indonesia is largely determined by the objective conditions built by the Muslims themselves through qualifications and political capacities that are insightful in the formation of the intellectuality of their people. The condition of Muslims today has indeed progressed, but institutionally politically it has regressed. Therefore, discussing Islamic and political issues is felt increasingly urgently by Muslims themselves. The engineering of the conversation and its implementation includes a doctrinal Understanding of Islam that is contextual to the political growth of the nation, a coaching system that can liberate people from material and spiritual backwardness, and leadership that is not only charismatic, but also dedicative and professional.*

Keywords: *Islam, Politic, Perspective, Historical*

Abstrak: Penelitian ini menjelaskan tentang perspektif Islam dan politik di Indonesia yang dinamis. Hubungan antara keislaman dengan situasi politik yang ada di Indonesia tak selalu harmoni. Dengan metode kualitatif melalui studi pustaka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ndikasi Islam dan politik merupakan dua aspek yang menyatu dalam perkembangannya yang tidak pernah terputus dari periode sebelumnya. Eksistensi Islam di Indonesia sangat ditentukan oleh kondisi objektif yang dibangun umat Islam itu sendiri melalui kualifikasi dan kapasitas politik yang berwawasan pembentukan intelektualitas umatnya. Kondisi umat Islam dewasa ini memang telah mengalami kemajuan, namun secara institusi politik telah mengalami kemunduran. Oleh karena itu, membicarakan persoalan Islam dan politik dirasakan semakin urgen oleh umat Islam itu sendiri. Rekayasa pembicaraan dan implementasinya meliputi pemahaman Islam doktrinal yang kontekstual dengan pertumbuhan politik bangsa, sistem pembinaan yang dapat membebaskan umat dari keterbelakangan material maupun spiritual, serta kepemimpinan yang tidak saja kharismatik, melainkan juga dedikatif dan profesional.

Kata kunci: Islam, Politik, Perspektif, Sejarah

PENDAHULUAN

Penelusuran terhadap sejarah perpolitikan di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara sehingga dapat digunakan untuk mengungkap perjalanan perubahan sistem politik umat Islam di Indonesia. Berpikir secara dialektis akan terlihat perjalanan sejarah sebagai sesuatu yang

mapan dan mendapat reaksi hingga pada akhirnya melahirkan sintesa baru. Pendekatan ini tentu dapat digunakan untuk mengamati perjalanan sejarah Islam dan politik di Indonesia sebagai umat mayoritas yang memeluk agama Islam. Keberadaan umat Islam di negara ini sering menjadi bahan pembicaraan dan peranannya pun mengalami pasang surut. Ia pasang hampir pada setiap permulaan babak baru, tetapi pada umumnya kemudian surut.¹ Berbagai pembicaraan tentang Islam dalam konteks politik di Indonesia juga mengindikasikan bahwa ia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Tulisan ini bertujuan membicarakan Islam pada pentas politik Indonesia dalam perspektif sejarah. Untuk mempermudah penulis mencoba membahas tiga perspektif, yakni memahami trend politik Islam sebagai sebuah dasar, Islam pada orde Baru, diskripsi pemikiran Islam masa kini dengan berbagai harapan yang seharusnya terjadi. Untuk memperkuat analisisnya akan digunakan tinjauan literatur (*literature review*) yakni sebuah pendekatan pustaka yang mendukung identifikasi pertanyaan penelitian tertentu. Tinjauan literatur perlu menggambar dan mengevaluasi berbagai jenis sumber termasuk artikel jurnal akademik dan profesional, buku, dan sumber relevan.²

PEMBAHASAN

Trend Politik Islam sebagai Sebuah Dasar

Berdasarkan kajian terhadap sumber ajaran Islam al-Qur'an dan sunnah, setiap muslim meyakini bahwa kedua sumber ajaran tersebut memberikan skema kehidupan (*the scheme of life*) yang sangat jelas. Skema kehidupan ini bermakna bahwa masyarakat yang harus dibangun oleh setiap muslim adalah masyarakat yang tunduk pada kehendak Ilahi, sehingga klasifikasinya tentang nilai baik dan buruk harus dijadikan kriteria atau landasan etis dan moral bagi pengembangan seluruh dimensi kehidupan.³ Karenanya pembumian nilai-nilai Islami merupakan suatu tuntutan terhadap umat Islam. Agaknya akan lebih memperjelas masalah dengan mengutip ungkapan yang ditulis oleh H.A.R. Gibb dalam bukunya *Wither Islam*, bahwa bukan hanya a *system of theology*, lebih dari itu Islam merupakan a *complete civilization*. Dengan nada yang konfirmatif Nasir mengatakan bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari seluruh dimensi kehidupan.⁴

Islam tidak memisahkan persoalan-persoalan rohani dengan persoalan-persoalan dunia, melainkan mencakup kedua segi ini. Hukum Islam (*syariat*) mengatur keduanya, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Menyadari akan hal ini, umat Islam memerlukan kekuasaan politik sebagai instrumen yang vital bagi pelaksanaan nilai-nilai Islami. Dalam kitabnya *al-Siyasah al-Syar'iyah*, Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa nilai (organisasi politik) bagi kehidupan kolektif manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa tumpangnya, agama tidak akan tegak dengan kokoh.⁵ Muhammad Asad berpendapat bahwa suatu negara dapat menjadi benar-benar Islami hanyalah dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap kehidupan bangsa, dan dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam undang-undang negara. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara Islam apabila ajaran Islam tentang sosio-politik dilaksanakan dalam kehidupan rakyat berdasarkan konstitusi.⁶

¹ Deliar Noer, *"Islam dan Politik: Mayoritas dalam Minoritas"* dalam Prisma, No.5 Thn. XVII, 1988, hlm.3.

² Jennifer Rowley and Frances Slack, "Conducting a Literature Review," *Management research news* 27, no. 6 (2004).

³ Amin Rais, *Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987, hlm. 50- 51.

⁴ Dikutip dari Nasir Tamara, *"Sejarah Politik Islam Orde Baru"*, dalam Prisma, No. 5 Thn. XVII, 1988, hlm. 1.

⁵ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasash al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1952, hlm. 174. Lihat juga Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah*, Jilid XXVIII, disunting oleh Muhammad Abdurrahman Ibnu Qasim, Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1963, hlm. 62.

⁶ Amin Rais, *Cakrawala Islam...*, hlm. 52;

Untuk mewujudkan cita-cita itu memerlukan perjuangan dan perjalanan yang panjang. Ini telah dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Sebab disadari sekali bahwa perjuangan melawan segala bentuk kezaliman merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Prinsip ini diyakini benar oleh umat Islam sehingga jika tidak dilaksanakan atau tidak tercapai maka mustahil pelaksanaan ajaran Islam secara benar akan dapat diterapkan dengan baik. Oleh karena itu sangat wajar sekali bila dikatakan umat Islam Indonesia dikenal sebagai penantang-penantang gigih terhadap segala bentuk imperialisme.

Para pemimpin umat Islam yang tergabung dalam berbagai partai politik membangun semangat kebangsaan yang tetap dilandasi benang merah Islam. Warna perjuangan dalam membentuk suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, tentu tidak harus terhenti setelah bebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Sebagai suatu bangsa yang majemuk bukan hanya dalam bentuk perbedaan suku dan adat namun yang lebih serius adalah pada dataran perbedaan keyakinan dan agama tentu menimbulkan berbagai perbedaan kehendak dalam mewarnai bangsa dan negara ini. Akibatnya yang tidak dapat dihindarkan tentu munculnya berbagai pergumulan antara sesama anak bangsa yang dilatarbelakangi perbedaan agama. Bagi umat Islam, negara yang ingin dibentuk tentu berdasarkan ajaran Islam, dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam konstitusi negara. Inilah tema sentral yang diperjuangkan oleh para pemimpin Islam di Indonesia yang pertama ketika menjelang proklamasi dan yang kedua pada masa kemerdekaan.

Berakhirnya masa penjajahan dengan diproklamákannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menuntut para pemimpin bangsa bekerja keras untuk menata dan memberikan wajah baru bagi Republik ini. Isu yang paling asasi ialah menetapkan Dasar Negara. Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia melalui para pemimpin berupaya konsisten terhadap identitas mereka dengan memperjuangkan agar nilai-nilai Islam termaktub dalam konstitusi negara.

Berawal dari perjuangan gigih dalam panitia sembilan yang diketuai oleh Soekarno dengan melahirkan “Piagam Jakarta” yang di tandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Isu ini mencapai klimaksnya dalam perdebatan di Majelis Konstituante hasil pemilu I tahun 1955. Inilah yang tentunya dapat dianggap sebagai diskripsi fakta sejarah bangsa Indonesia khususnya umat Islam, yang membentuk trend politik Islam yang terus berkembang dalam perjalanan sejarah perpolitikan bangsa Indonesia sampai dewasa ini.

Islam Pada Masa Orde Baru

Orde Baru sebagai satu babakan sejarah dari mata rantai sejarah Indonesia tidaklah luput dari filosofi sejarah pada umumnya, yakni berada pada kisaran hukum refleksi, dan interaksi dialeksi. Ini berarti orde baru, di samping merupakan perwujudan aksi-reaksi masyarakat yang terawetkan terhadap problem aktual, memberikan getaran timbal balik pada kehidupan manusia dalam perspektif kulturalnya, juga merupakan antitesa terhadap sejarah yang mendahuluinya.⁷

Harus diakui Orde Baru telah melahirkan optimisme, pranata dan tawaran alternatif yang mempengaruhi struktur, pola kultur dan persepsi masyarakat dalam memandang masa depan negara, bangsa dan masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah institusi Islam dan persepsi umatnya dalam konteks upaya aktualisasi diri. Lahirnya orde Baru di pertengahan tahun 1966 yang kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai orde pembangunan, telah membawa perubahan di hampir semua bidang kehidupan bangsa, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Dalam bidang politik, perubahan itu terjadi dengan adanya mekanisme perwujudan partisipasi politik rakyat dan penyegaran kepemimpinan nasional yang dimanifestasikan melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Berikutnya, pada tahun 1973 telah dilakukan penyederhanaan partai melalui fusi, dari 10 partai menjadi 3 partai, yakni Partai Persatuan

⁷ Fachry Ali dan Bachtiar Efendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1986, hlm. 93–106.

Pembangunan (PPP), yang merupakan gabungan dari partai-partai Islam, NU, Permusi, PSII dan Perti; Partai Demokrasi Indonesia (PDI), gabungan dari PNI, Parkindo, Partai Katholik, Murba, dan IPKI; Golongan Karya (Golkar). Tidak satupun dari ketiga parpol itu yang membawa nama agama atau ideologi kultural lainnya. Bahkan satu-satunya partai yang mengusung Islam, PPP, harus merelakan identitas keislamannya hilang. Padahal identitas keislamannya itulah menjadi kekuatan PPP. Rekayasa partai politik ini diikuti juga dengan kebijaksanaan masa mengambang (floating mass) yang membatasi kegiatan politiknya di Daerah Tingkat II ke atas; dan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi parpol (1983) dan Ormas (1985).

Pemerintah dengan semua rekayasannya itu adalah bagian penting dari apa yang disebut dengan birokratisasi, yakni keterlibatan pemerintah terhadap seluruh aktifitas rakyat. Hal ini sebenarnya merupakan suatu perwujudan dari obsesi pemerintah yang didominasi ABRI (sekarang berubah menjadi TNI dan POLRI) dalam rangka mewujudkan ketertiban dan stabilitas nasional sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan secara lancar dan penuh perhatian. Di awal kelahirannya, Orde Baru sangat menguntungkan Islam, karena muncul orde baru ini berarti telah melenyapkan orde lama dan gerakan Soekarnoisme yang didukung oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai yang anti agama.

Kenyataannya dapat dicermati dengan banyaknya dukungan dari parpol-parpol, ormas-ormas Islam kepada Orde Baru. Meskipun demikian, tidak semua keinginan kelompok Islam dapat dikabulkan. Seperti diketahui, bahwa pada awal kelahiran Orde Baru, tokoh-tokoh Masyumi memperjuangkan agar tokoh-tokoh mereka yang masih ditahan Orde Lama segera dilepaskan dan Partai Masyumi sendiri direhabilitir, tetapi apa yang menjadi tuntutan itu tidak dapat dikabulkan. Demikian pula dengan Bung Hatta yang akan mendirikan Parta Demokrasi Islam. Sebagai jalan keluarnya dibentuklah Partai Muslimin Indonesia (Permusi) yang diharapkan dapat menjadi penjelmaan dari partai Masyumi yang telah dilarang. Namun pemerintah menginginkan agar partai tersebut menjadi partai baru yang tidak ada sangkut pautnya dengan partai Masyumi, bahkan para bekas tokoh-tokoh Masyumi pun tidak diperbolehkan memimpin partai baru tersebut.⁸

Dalam Pemilu pertama sejak Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1971, partai-partai Islam hanya mendapatkan suara sekitar 29% dan Perti hanya 0,7%. Sedangkan Golkar memperoleh suara 62,8%, PNI 6,4%, Perkindo dan Partai Katholik 2, 45%.⁹ Kemudian dapat dicatat bahwa kelahiran PPP sebagai fusi dari Partai-Partai Islam pada tahun 1973 sebenarnya tidaklah sederhana. Fusi bukanlah ide dari pemimpin partai, melainkan berasal dari pemerintah. Dan meskipun para pemimpin partai dari keempat partai tersebut sudah bersepakat untuk meleburkan diri dalam sebuah partai yang disebut atau diberi nama PPP, namun latar belakang kulturalnya yang berbeda tetap menjadi faktor potensial bagi perpecahan, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa lalu, yakni ketika PSII yang kemudian disusul oleh NU memisahkan diri dari Masyumi. Ternyata kekompakan itu hanya bertahan sampai tahun 1973 sampai menjelang pemilu tahun 1982.

Pada gilirannya, sejarah telah membuktikan menjelang Pemilu tahun 1982 semakin nampak perbedaan yang tajam antara unsur-unsur dalam tubuh PPP semakin nampak. Faktor utama penyebabnya, karena J. Naro yang menggeser calon-calon dari unsur NU dalam daftar calon anggota DPR. Sikap yang membawa kekacauan dalam tubuh partai politik telah mengakibatkan berkurangnya jumlah kursi PPP di DPR yakni sebanyak 6 kursi dibandingkan dari jumlah kursi yang diperoleh pada tahun 1977 yang memperoleh 99 kursi.¹⁰ Sejak inilah PPP berada dalam posisi yang semakin tidak menentu dengan adanya sikap otoriter yang ditampilkan J. Naro terhadap setiap pimpinan partai yang berbeda dengannya. Bukan itu saja, sikap otoriter itu juga diterapkan terhadap mereka yang berasal dari unsur yang sama dengan dirinya (Permusi), bila perbedaan yang mereka munculkan. Sikap ini berdampak tidak menguntungkan partai, yang

⁸ Nasir Tamara, "*Sejarah Politik Islam Orde Baru*", dalam Deliar Noer, *Islam dan Politik...*, hlm. 3.

⁹ Nasir Tamara, "*Sejarah Politik Islam Orde Baru*", hlm. 3

¹⁰ Nasir Tamara, "*Sejarah Politik Islam Orde Baru*", hlm. 4

dapat dilihat dari hasil Pemilu tahun 1987 dengan perolehan PPP hanya 61 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadi meskipun pada awalnya Orde Baru itu memberikan peluang dan posisi memungkinkan bagi umat Islam untuk memperkuat dan menentukan sikap politiknya, namun pada perjalanannya telah dikacaukan oleh munculnya ambisius kelompok dan pribadi. Makanya orientasi politik dan implementasinya oleh umat Islam telah menimbulkan konflik internal yang serius, sehingga menyudutkan umat yang mayoritas menjadi veriferian dalam percaturan pembangunan secara nasional.

Deskripsi Pemikiran Islam dan Tarikan Sejarah

Kehadiran Orde Baru sebagaimana dijelaskan di atas adalah sebagai orde yang telah melahirkan upaya-upaya restrukturisasi perikehidupan bangsa baik dalam sosial, politik, budaya, ekonomi dan aspek lainnya. Slogan pembaharuan telah menjadi format politik baru.¹¹ Namun, yang perlu dicatat bahwa pelanggaran isu pembaharuan (modernitas) memberi pengaruh yang cukup dalam di kalangan elite Islam. Apakah pembaharuan yang sedang bergulir menyertai dinamika pembangunan yang mengacu pada program oriented dan sikap pragmatis; atau akan berdampak positif bagi Islam atau justru merupakan pukulan yang dahsyat yang mengancam eksistensinya.

Berdasarkan fakta sejarah, setelah mandegnya rehabilitasi Masyumi dan munculnya pendirian Partai Demokrasi Islam Indonesia serta semakin sempitnya ruang gerak partai Islam, meskipun tokoh-tokohnya pertama kali optimis namun pada gilirannya kalangan Islam banyak mengambil warna keras dalam merespon arus pembangunan dan modernisasi, akibatnya menempatkan umat Islam pada posisi marginal dalam pembangunan itu sendiri.

Sejalan dengan perkembangannya, sebetulnya telah terjadi arus baru di kalangan muda Islam Yogya dalam mengantisipasi persoalan Islam. Keadaan dipertanyakan secara kritis. Islam dan kelembagaannya dibicarakan secara cerdas. Walaupun di sana-sini menimbulkan tanggapan pro dan kontra, paling tidak didapatkan diskripsi bahwa sebagian masih dapat memahami orientasi politik dalam perjuangan Islam, sedangkan sebagian yang lain memandang orientasi tersebut perlu ditinjau kembali bahkan dirombak.¹²

Kelompok terakhir menawarkan alternatif pemahaman Islam secara lebih mendasar dan proporsional dalam konteks kemasyarakatan, tidak terbatas pada orientasi politik bahkan orientasi politik dan implikasinya telah menimbulkan konflik yang serius sehingga menyudutkan umat Islam yang mayoritas menjadi veriferian dalam percaturan pembangunan. Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan berlangsung terus. Oleh karenanya, perlu dirumuskan secara memungkinkan umat Islam berperan sejajar dengan umat yang lain dalam pembangunan atau pada sudut pandang yang lain tidak menurunkan citra Islam sebagai agama.

Gerakan pemahaman Islam secara kritis dan empirik ini mendapatkan momentumnya pada awal tahun 70-an pada saat Nurcholis Madjid melontarkan gagasan “Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat”, 3 Januari 1970. Dengan peran masmedia yang demikian intens, gagasan itu tersebar dengan cepat dan menyentak suasana yang telah terkondisi. Wajarlah jika reaksi dari berbagai kalangan segera bermunculan baik yang pro dan kontra. Muatan isi yang ditonjolkan oleh pemikiran baru itu adalah seputar liberalisasi pandangan, sekularisasi, kebebasan berpikir, idea of progress, inklusifisme, pemisahan Islam sebagai nilai dan partai Islam sebagai alat.¹³

Eksistensi pemikiran awal tahun 70-an, di mana lingkaran Yogya dapat disebut sebagai induknya memberikan pengaruhnya tersendiri dan terjalin dengan rangkaian-rangkaian sebelumnya. Sehingga sebagian pengamat memosisikannya sebagai gerakan reaktif terhadap corak perubahan sosial-politik yang sedang berlangsung. Tentu persoalannya tidak sesederhana

¹¹ Fachry Ali dan Bachtiar Efendi, *Merambah Jalan Baru Islam...*, hlm. 107.

¹² Abdurrahman Wahid, *Pergolakan Pemikiran Islam*, Jakarta: LP3ES, 1980, hlm. 46.

¹³ Nurcholish Madjid, *Islam Komedernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987, hlm. 171–208.

itu, melainkan di samping akibat pengaruh gejolak budaya aktual, juga merupakan sintesa terhadap pola pemahaman sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa pola pembaharuan yang terjadi di Indonesia melalui fase puritanistik politis, ideologis, pendidikan dan sosial.

Pada tolok ukur tertentu diketahui bahwa pembaharuan sebelumnya dianggap telah gagal menghantarkan Islam ke pangkuan pemeluknya¹⁴, kalah dalam mewujudkan cita-cita politiknya. Pada posisi lain dapat dinilai bahwa mereka telah berbuat dan juga berprestasi dalam konteks zamannya. Kembali pada pemahaman pada pembaharuan 70-an, terlepas dari terminologi yang digunakan, yang dianggap kurang tepat oleh sementara kalangan dan Nurcholish Madjid sendiri menyadari bahwa terminologi yang dipakai memang kontroversial dan menganjurkan pemakaian istilah teknis yang lebih tepat dan netral.¹⁵

Secara substansial gerakan itu telah menawarkan landasan-landasan dasar dalam kerangka mengembalikan daya gerak psikologis (psycho-striking force) umat Islam melalui titik pandang yang realistik; tidak apologetik. Arah yang menjadi bidikannya paling tidak tercermin pada analisis bahwa supaya umat Islam tidak dapat mengenali dan mengarahkan gejala-gejala modernitas, tidak terasing dari padanya dan tidak lagi berada pada posisi marginal dalam dinamika pembangunan, khususnya ikut dan melakukan pengambilan kebijakan politik bangsa. Untuk ke arah itu diperlukan prasyarat dasar berupa pembenahan kalau tidak perombakan pola-pola pandang, kebebasan berpikir, keterbukaan sikap dan meletakkan Islam menjadi membumi sebagai sistem nilai.

Islam Dewasa Ini

Komitmen orde baru terhadap program pembangunan bangsa Indonesia melalui partai Islam dirasakan begitu besar. Akan tetapi arah dan bentuk pembangunan "ideal" yang akan dilaksanakan di masa akan datang masih terjadi perbedaan pandangan di awal masa Orde Baru. Fenomena ini sangat beralasan, karena pada saat itu para birokrat dan teknokrat banyak yang berlatar belakang pendidikan sekular dan kultur priyayi – abangan. Dampaknya terlihat pada corak pembangunan yang dilaksanakan lebih berwatak modernisasi yang kebarat baratan (westernized). Warna ini menjadikan umat Islam termasuk para tokoh modernismenya melihat modernisasi ini penuh dengan kecurigaan, bahkan menentangnya.

Sehingga seringkali umat Islam menjadi sasaran kritik dari pihak pemerintah dengan klaim bahwa Islam anti pembangunan, anti modern, anti Pancasila dan seterusnya. Ini terjadi karena gerakan modernisme Islam di awal masa ini sampai awal orde baru sebenarnya lebih merupakan gerakan pemurnian Islam dari pada gerakan yang menekankan bagaimana meningkatkan kualitas umat Islam dan memahami ajaran-ajaran Islam agar dapat merespon perkembangan kehidupan yang ada. Pemikiran yang muncul dari Masyumi misalnya tentang politik, ternyata itu hanya merupakan pemikiran yang ditransfer dari Barat dengan bungkus Islam.

Deliar Noer sebagai tokoh Islam pertama secara terbuka mengatakan bahwa modernisasi itu tidak bertentangan dengan Islam, melainkan menjadi suatu keharusan.¹⁶ Pernyataan ini kemudian diikuti oleh Nurcholish Madjid, yang dalam beberapa hal justru mempunyai jangkauan pemikiran lebih jauh seperti pendapatnya bahwa langkah utama untuk melakukan modernisasi bagi umat Islam harus dengan menciptakan iklim yang liberalistik. Salah satu bagian dari proses ini adalah apa yang diistilahkan dengan sekularisasi yang berbeda dengan istilah baku.¹⁷ Setelah munculnya dua pemikiran ini, kemudian diikuti pula oleh pemikir-pemikir lainnya, terutama muncul pada dekade tahun 80-an, yang kemudian menurut Fachry Ali dan Bachtiar Effendi diklasifikasikan menjadi empat pola utama, yakni: Neo-modernisme dengan tokohnya

¹⁴ A. Wahib dalam Awad Bahason, *Massa Islam Dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa*, dalam Prisma, No. Ekstra, 1984, hlm. 129.

¹⁵ Nurcholish Madjid, dalam Basri Ananda, *Sekitar Usaha Membangkitkan Etos Intelektulisme Islam di Indonesia*, Jakarta: Pelita, 1985, hlm. 28.

¹⁶ Fachry Ali dan Bachtiar Efendi, *Merambah Jalan Baru Islam...*, hlm. 110.

¹⁷ Fachry Ali dan Bachtiar Efendi, *Merambah Jalan Baru Islam...*, hlm. 129

Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Majdid, Sosialisme Demokrasi Islam dengan tokohnya M. Dawam Raharjo dan Adi Sasono, Universalisme dengan tokohnya Jalaluddin Rahmat dan AM. Saefuddin, Modernisme dengan tokohnya Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Djohan Effendi.¹⁸ Dengan munculnya pola-pola pemikiran baru ini, dikotomi tradisional-modernis tidak terlihat lagi bahkan menjadi semakin pudar.

Sejalan dengan adanya pembaharuan pemikiran, telah terjadi pula perubahan orientasi organisasi dari para pemimpin Islam. Sebelumnya format perjuangan Islam lebih difokuskan melalui jalur politik, dalam perkembangan selanjutnya format perjuangan meliputi bidang yang lebih luas dan konkrit, terutama upaya-upaya untuk membebaskan umat Islam dari kebodohan dan kemiskinan. Dahulu ormas-ormas Islam dengan segenap underbow-nya lebih berperan sebagai penggalang masa dan pemimpinya berorientasi pada politik praktis seperti menjadi anggota DPR, dan kalau bergerak di bidang pendidikan atau sosial misalnya itupun hanya terbatas, maka pada saat ini ormas-ormas itu berperan untuk membina umat dalam bidang yang lebih luas. Untuk melaksanakan program pembinaan ini secara efektif, Muhammadiyah misalnya, telah membentuk badan-badan otonom yang terdiri dari Majelis Ekonomi, Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, Majelis Tabligh dan Majlis Tarjih. Sedangkan NU membentuk lembaga Pendidikan Ma'arif, Majelis Sosial Mabarrot, Lembaga Kemaslahatan Keluarga, Lembaga Pengembangan dan Pembangunan Pertanian, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, dan Lajnah Ta'wir wa Nasyr.

Di samping program pembinaan yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam yang berskala nasional, kini telah tumbuh yayasan-yayasan, lembaga-lembaga pendidikan dan pengembangan masyarakat yang bersifat lokal, di samping adanya individu-individu yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat yang tidak menggunakan simbol Islam, tetapi mereka tetap peduli terhadap pelembagaan Islam. Kemudian di sisi lain, perubahan orientasi ini membawa konsekuensi adanya diversifikasi kepemimpinan umat Islam yang kini terdiri dari ulama, tokoh-tokoh organisasi Islam, intelektual muslim dan pejabat negara di bidang agama Islam. Meskipun pada saat ini terjadi depolitisasi Islam atau kemuduran politik Islam secara institusional serta kekuatan tawar menawar (*bergaining power*) para pemimpin Islam, akan tetapi tidak hanya berlangsung di lingkungan masyarakat yang secara tradisional memang mentaati Islam (*santri*), melainkan juga menembus ke universitas-universitas, kantor-kantor swasta dan birokrasi pemerintah, yang disertai dengan semakin banyaknya serana-sarana ibadah di sekitar mereka.

Penyaluran aspirasi umat Islam kemudian mengalami perubahan. Kalau pada masa lalu, PPP dianggap sebagai satu-satunya sarana penyaluran aspirasi umat Islam, maka pada saat ini aspirasi itu bisa disalurkan juga melalui, PKS, PBR, PKB, PAN, PBB dan partai-partai lainnya termasuk partai lokal khusus di Nanggroe Aceh Darussalam yang lahir setelah perjanjian damai Helsinki. Persoalannya, apakah penyaluran itu dapat dilayani dan disalurkan oleh pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya kepada umat Islam, atau sekedar membudayakan Islam yang selalu dianggap identik dengan kultur atau budaya modern yang selalu ditemukan berada bahkan kontras dengan nilai-nilai Islam.

Kenyataan di atas mengidentifikasikan bahwa tantangan yang dihadapi umat Islam semakin variatif, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sementara persoalan-persoalan traumatis pun belum dapat dihilangkan seluruhnya, yang menurut Aswab Mahasin adalah benturan antara tradisionalisme dan modernisme, antara ikatan-ikatan keagamaan dan kebangsaan, dan antara *santri* dan *abangan*.¹⁹ Tantangan eksternal yang tak bisa dielakkan adalah cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang kuat pengaruhnya terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang semakin sekular.

Sementara tingkat pendidikan umat masih rata-rata rendah, dan dinamika pemahaman Islam yang mengalami kelambanan dibandingkan dengan lajunya perkembangan ilmu

¹⁸ Fachry Ali dan Bachtiar Efendi, *Merambah Jalan Baru Islam...*, hlm. 170

¹⁹ Aswab Mahasin, "*Marhaban*", dalam *Prisma*, No. Ekstra, 1984, hlm. 2.

pengetahuan dan teknologi modern. Demikian pula akulturasi budaya yang semakin mengaburkan bahkan tidak hanya nilai peradaban bangsa, melainkan juga memarginalkan umat Islam dari nilai Islam yang benar. Meskipun arus back to Islam semakin deras, namun upaya penerimaan dan penyesuaian secara jujur jauh dari yang diharapkan. Pada sisi lain, upaya-upaya penyebaran agama non-Islam (proses kristenisasi) dengan berbagai cara sejak dua dasawarsa ini mengalami kemajuan. Kenyataan ini tentu berdampak pada berkurangnya jumlah umat Islam, setidaknya memperlamban upaya memahami nilai keislaman bagi masyarakat karena umat Islam terjebak dengan sistem toleransi beragama dan kerjasama yang mereka galang.

KESIMPULAN

Berdasarkan gambaran di atas dapat dikemukakan indikasi Islam dan politik merupakan dua aspek yang menyatu dalam perkembangannya yang tidak pernah terputus dari periode sebelumnya. Eksistensi Islam di Indonesia sangat ditentukan oleh kondisi objektif yang dibangun umat Islam itu sendiri melalui kualifikasi dan kapasitas politik yang berwawasan pembentukan intelektualitas umatnya. Kondisi umat Islam dewasa ini memang telah mengalami kemajuan, namun secara institusi politik telah mengalami kemunduran. Oleh karena itu, membicarakan persoalan Islam dan politik dirasakan semakin urgen oleh umat Islam itu sendiri. Rekayasa pembicaraan dan implementasinya meliputi pemahaman Islam doktrinal yang kontekstual dengan pertumbuhan politik bangsa, sistem pembinaan yang dapat membebaskan umat dari keterbelakangan material maupun spiritual, serta kepemimpinan yang tidak saja kharismatik, melainkan juga dedikatif dan profesional. Dengan demikian, keberadaan Islam akan dapat memberi arti bagi pertumbuhan bangsa, paling tidak bagi pemeluknya, atau dengan istilah al-Qur'an adalah rahmatan li al-alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wahib dalam Awad Bahason, *Massa Islam Dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa*, dalam Prisma, No. Ekstra, 1984.
- Abdurrahman Wahid, *Pergolakan Pemikiran Islam*, Jakarta: LP3ES, 1980.
- Amin Rais, *Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987.
- Aswab Mahasin, "Marhaban", dalam Prisma, No. Ekstra, 1984.
- Deliar Noer, "Islam dan Politik: Mayoritas dalam Minoritas" dalam Prisma, No.5 Thn. XVII, 1988.
- Dikutip dari Nasir Tamara, "Sejarah Politik Islam Orde Baru", dalam Prisma, No. 5 Thn. XVII, 1988.
- Fachry Ali dan Bachtiar Efendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1986.
- Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1952.
- Nurcholish Madjid, dalam Basri Ananda, *Sekitar Usaha Membangkitkan Etos Intelektulisme Islam di Indonesia*, Jakarta: Pelita, 1985.
- Nurcholish Madjid, *Islam Komedernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987.
- Rowley, Jennifer, and Frances Slack. "Conducting a Literature Review." *Management research news* 27, no. 6 (2004).